

Strategi Inggris Raya Terhadap Permasalahan Industri Agrikultur Pasca Brexit

Azam Abdil Majid¹, Sindy Yulia Putri², Wiwiek Rukmi Dwi Astuti³

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

azamamjd@gmail.com

Abstract

Brexit has restricted the flow of migrant workers in the industrial sector and agricultural system in the United Kingdom. This research examines the dynamics of the agricultural industry issues in the United Kingdom, as well as the strategies implemented by the UK government to minimize the issues faced in the agricultural sector. The methodology employed is qualitative, utilizing theories of international migration and concepts of international immigration policy. The UK Government has implemented strategies to minimize the agricultural issues after Brexit. These strategies include implementing seasonal worker visas, adopting a points-based immigration system, formulating the agricultural act 2020, promoting local workers, and embracing automation. These strategies have successfully minimized the issues in the agricultural industry in the United Kingdom.

Keywords: *Brexit, Migrant Workers, Agriculture Industry*

Abstrak

Brexit membatasi arus pekerja migran pada sektor industri dan sistem agrikultur di Inggris Raya. Penelitian ini membahas dinamika permasalahan industri agrikultur Inggris Raya serta strategi dan pengaruh strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Inggris Raya dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi di industri agrikulturnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori migrasi internasional dan konsep kebijakan imigrasi internasional. Pemerintah Inggris Raya menerapkan strategi untuk meminimalisir permasalahan agrikultur setelah Brexit. Adapun strategi Pemerintah Inggris Raya berupa menerapkan visa pekerja musiman, memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin, merumuskan kebijakan agrikultur 2020, mendorong pekerja lokal dan otomatisasi. Strategi tersebut berhasil meminimalisir permasalahan di industri agrikultur Inggris Raya.

Kata Kunci: Brexit, Pekerja Migran, Industri Agrikultur

¹Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan politik internasional semakin kompleks dengan munculnya aktor-aktor baru di luar negara. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor di luar negara yang juga memiliki kompleksitas di dalamnya. Uni Eropa adalah organisasi supranasional yang terletak pada benua Eropa. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan yang memicu adanya gejolak dalam organisasi internasional ini. Pada akhirnya, salah satu anggota negara Uni Eropa, Inggris Raya mengadakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa pada 2016, yang dikenal dengan istilah Brexit (*British Exit*). Melalui Brexit, terdapat transformasi perubahan kebijakan pada Inggris Raya, salah satunya kebijakan terkait migrasi. Transformasi kebijakan ini akibatnya berdampak kepada penurunan pekerja migran di Inggris Raya dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam sektor industri-industri di Inggris Raya, salah satunya adalah industri agrikultur. Melalui kebijakan baru ini, Inggris Raya membuat strategi dalam mengatasi permasalahan pasca transformasi kebijakan migrasi baru era Brexit yang membatasi arus pekerja migran pada sektor industri dan system agrikultur di Inggris Raya. Menurut *UK Farming Union Representative*, selama ini Inggris Raya mengandalkan tenaga kerja migran. Pekerja migran adalah aktor penting yang sama pentingnya dengan pupuk dan penyemprot pada bidang agrikultur (Milbourne & Coulson, 2021a).

Permasalahan migrasi merupakan pusat politik dari Brexit (*British Exit*), terlebih dalam masalah konsekuensinya terhadap ekonomi di Inggris Raya dalam referendum Brexit (Portes, 2022). Fenomena permasalahan Brexit dan pembaruan kebijakan migrasi selepasnya dari Uni Eropa penting dibahas dalam studi Hubungan Internasional. Permasalahan baik dari segi kendali atas kedaulatan wilayahnya, hingga ke kebijakan sistem migrasi. Lebih lanjut keputusan Brexit diperkarai oleh masalah migran yang dihadapi Inggris Raya dalam kurun waktu yang lama. Di Inggris dan Wales, jumlah warga keturunan asing melonjak menjadi 13,4% dari populasi pada 2011, sekitar dua kali lipat dibandingkan 1991. Beberapa tahun terakhir, migran telah tergiur dengan ekonomi di negara Eropa yang tumbuh dua kali lipat dalam zona Eropa (Pammasena, 2017). Adanya fakta bahwa Inggris merupakan negara yang berada di kawasan Eropa. Dengan tingkat ekonomi terbesar kedua setelah Jerman dan dengan tingkat populasi terbanyak ketiga setelah Perancis. Fakta tersebut menjadikan Inggris Raya sasaran tempat tinggal migrant dengan motif mencari kehidupan lebih baik lagi (Pammasena, 2017). Pemungutan suara Brexit di Inggris Raya untuk melepaskan keanggotaan Uni Eropa dimotivasi secara tegas terhadap pergerakan bebas warga negara Uni Eropa untuk bermigrasi ke Inggris Raya (Lutz, 2021).

Sistem Uni Eropa yang memberikan hak kepada warga negara anggotanya untuk dapat tinggal dan bekerja di dalam semua negara anggotanya, yang merupakan fondasi utama dari Uni Eropa. Tidak adanya batasan dalam bermigrasi di kawasan Uni Eropa merupakan sebuah pencapaian penting dalam integrasi Eropa, di satu sisi hal tersebut juga menjadi pemicu munculnya Euroskeptisisme. Poin penting yang menjadi pendorong Euroskeptisisme berkaitan dengan identitas nasional dan sentimen anti migrasi. Sikap negatif terhadap migrasi merupakan hasil dari ancaman identitas nasional yang dirasakan oleh para Euroskeptisisme. Menurut McLaren, adanya pandangan bahwa migrasi orang-orang Eropa dan migrasi orang-orang non-Eropa itu identik dan sama (Lutz, 2021). Gerakan warga Inggris Raya melalui Brexit untuk keluar dari Uni Eropa merupakan kampanye untuk menunjuk mobilisasi

migran Eropa, terkhusus warga negara Eropa yang berasal dari Eropa Tengah dan Eropa Timur dengan pandangan yang negatif. Para pendukung Euroskeptisime membangun narasi kuat untuk membuat kelompok migran ini keluar dari Inggris Raya karena sudah di luar batas dengan merebut lapangan pekerjaan, membebani sistem bantuan kesejahteraan negara, dan mengancam identitas nasional negara (Milbourne & Coulson, 2021a).

Berakhirnya sistem pergerakan bebas (*free movement of persons*) Uni Eropa di Inggris Raya menciptakan kekurangan pekerja dalam pasar tenaga kerja terutama dalam industri yang bergantung pada migran (Sumption, 2022). Perluasan Uni Eropa pada 2004 dengan memasukkan negara-negara A8 seperti Estonia, Republik Ceko, Lituania, Hongaria, Latvia, Lituania, Slovenia, Slovakia, dan Polandia, serta pada 2007 negara-negara A2 seperti Bulgaria dan Rumania menghasilkan peningkatan dalam jumlah migran negara-negara anggota baru Uni Eropa yang bermigrasi ke Inggris Raya dalam mencari pekerjaan. Migran yang bekerja dari negara-negara tersebut mencari pekerjaan di sektor agrikultur dan para pekerja migran ini sekarang dipandang sebagai komponen penting dalam system agrikultur di Inggris (Milbourne & Coulson, 2021b).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha melakukan penelitian bersinggungan dengan dampak dari Brexit terhadap pekerja migran dan kaitannya dengan permasalahan industri agrikultur di Inggris Raya. Hal ini, berkaitan dengan kurangnya pekerja migran dalam industry agrikultur di Inggris Raya yang bergantung pada pekerja migran dari Eropa Timur dan Eropa Tengah. Melalui hal tersebut, Inggris Raya yang bukan lagi anggota Uni Eropa dan terlepas dari aturan Uni Eropa melaksanakan strategi dengan membuat Kebijakan Agrikultur 2020 (*Agriculture Act 2020*), Visa Pekerja Musiman, Sistem Imigrasi Berbasis Poin, Mendorong Pekerja Lokal dan Otomatisasi dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari keluarnya Inggris Raya dalam keanggotaan Uni Eropa pada industri agrikultur negaranya.

Migrasi Internasional

Migrasi internasional dalam konteks dunia internasional dapat tercermin melalui aktivitas pergerakan dan mobilisasi manusia dari dan menuju suatu negara melewati batas-batas wilayah negara dan budaya asal. Migrasi internasional terjadi dengan maksud dan latar belakang tertentu seperti mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, dan keinginan untuk menetap atau tidak di daerah luar batas negara asal. Menurut Everett S. Lee, migrasi internasional didefinisikan sebagai perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen di mana tidak ada batasan yang ditempatkan pada jarak perpindahan atau pada sifat sukarela atau tidak sukarela dari tindakan tersebut dan tidak ada perbedaan yang dibuat antara migrasi eksternal dan internal. Tidak peduli seberapa lama atau pendek, seberapa sulit atau mudah, setiap tindakan migrasi akan melibatkan tujuan, asal, dan serangkaian rintangan yang menghalangi. Di dalam rangkaian rintangan tersebut, Lee memasukkan jarak sebagai salah satunya (Lee, 1966).

Migrasi melibatkan elemen selektivitas, yang berarti migran bukanlah sampelacak dari populasi dari mana mereka berasal. Migran dipilih sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu, yang biasanya disebut sebagai variabel independen yang memicu untuk bermigrasi. Faktor yang memainkan peran penting dalam keputusan untuk bermigrasi seperti biaya potensial, jarak geografis, tenaga kerja dan hak asasi

manusia, insiden kejahatan, keamanan pribadi, akses ke perumahan, ketersediaan layanan sosial (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll), tingkat gaji, kemajuan karir, keamanan kerja, kualitas lingkungan, kapasitas dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan budaya asing, perbedaan bahasa, kualitas hubungan sosial dan tempatkerja, toleransi keagamaan, perasaan identitas dan kepemilikan, dan rasa hormat. Dari segi hukum, akan ada banyak perbedaan antara negara asal dan negara tujuan yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi (White, 2011).

Migrasi menjadi isu yang menentukan dalam kampanye Brexit, dengan slogannya untuk mengambil kembali kedaulatan dan menentang hukum Uni Eropa dan hak asasi manusia. Konsentrasinya terdapat pada pergerakan bebas (*free movement*) di dalam Uni Eropa yang menjadi masalah utama kaitannya antara migrasi dan Brexit. Di Inggris Raya, mereka yang menentang migrasi umumnya tidak membedakan antara berbagai kategori migran baik itu pekerja, hingga pengungsi (White, 2011).

Kebijakan Imigrasi Internasional

Imigrasi dan regulasi imigrasi telah menjadi isu politik yang menonjol di semua negara industri. Kebijakan imigrasi adalah pernyataan pemerintah tentang apa yang berniat dilakukan dan tidak dilakukan dalam undang-undang, peraturan, keputusan, atau perintah sehubungan dengan seleksi, penerimaan, penyelesaian, dan deportasi warga negara asing yang bermigrasi atau tinggal di negara tersebut (Bjerrredkk., 2015). Kebijakan imigrasi membentuk pola imigrasi yang berdampak terhadap demografi, budaya, ekonomi, dan politik suatu negara. Kebijakan pengendalian imigrasi merupakan komponen penting dalam menentukan pola imigrasi seperti jumlah orang yang ingin emigrasi ke negara-negara industri karena alasan ekonomi dan politik (Meyers, 2000).

Kebijakan imigrasi tidak homogen, tetapi biasanya terdiri dari kumpulan campuran dari langkah-langkah kebijakan yang menargetkan kelompok migran dan kebijakan yang berbeda dan dengan cara yang berbeda (Natter dkk., 2020). Kebijakan imigrasi juga menyangkut penerimaan dan seleksi imigran gelap, pekerja migran, pekerja migran sementara dan pengungsi, dan pembatasan imigran ilegal. Kebijakan imigrasi menjelaskan bagaimana keputusan negara dalam menerima seberapa banyak imigran yang diterima masuk, kapan bermigrasi, jenis imigrasi seperti apa baik imigran permanen, pekerja migran sementara, atau pengungsi, dan dari etnis serta wilayah mana mereka berasal (Meyers, 2000).

Berkaca dari kebijakan imigrasi, dalam menentukan kebijakan imigrasi, perlu melihat empat faktor. Faktor tersebut seperti peran kepentingan sosial-ekonomi di tingkat domestik yang bergerak melalui kelompok kepentingan dan opini publik, pentingnya kebijakan luar negeri dan kepentingan diplomatik, peran lembaga negara yang dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan, dan dampak norma-norma internasional pada pembuatan kebijakan nasional (Natter, 2018).

Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa berimplikasi bahwa Inggris Raya sudah tidak berkewajiban untuk mengikuti pada peraturan bersama Uni Eropa mengenai imigrasi dan kebijakan *free movement of persons*. Keluarnya Inggris Raya ini berdampak terhadap perubahan kebijakan imigrasi yang mengatur masuk dan keluarnya imigran di negara tersebut. Hal tersebut berdampak kepada pengurangan tingkat migrasi dari Uni Eropa ke Inggris Raya (Francisca dkk., 2017). Di bawah pergerakan bebas, warga negara Uni Eropa dapat bekerja dalam pekerjaan apapun

tanpa perlu memenuhi kriteria keterampilan sehingga banyak warga negara Uni Eropa yang bekerja di sektor tersebut berbeda dengan warga bukan Uni Eropa (Sumption &Reino, 2018).

2. Metodologi

Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan rujukan untuk memahami dan mengobservasi makna individu atau kelompok yang dipandang bersumber dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2009). Di dalam penelitian kualitatif terdapat pertanyaan dinamis yang muncul, proses pengumpulan data yang menyesuaikan situasi objek yang diteliti, proses analisis data yang induktif dan hasil interpretasi data yang cenderung subjektif (Creswell & Creswell, 2018). Menurut Bryman, metode penelitian kualitatif memiliki fokus pada studi kepustakaan terkait pengkajian penelitian-penelitian terdahulu, selanjutnya konstelasi diskusi yang terjadi, kemudian bukti yang dapat ditemukan dalam studi terdahulu, hingga kontribusi yang dapat ditemukan yang kemudian di analisis melalui teori dan konsep penelitian yang dirancangan oleh penulis dan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan (Bryman, 2008). Creswell juga mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai media penyampaian situasi, kasus, fenomena, subyek serta perilaku. Penelitian deskriptif berusaha untuk menyusun sejumlah informasi yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan atau kasus tertentu dalam penelitian (Creswell, 2009).

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan mendapatkan data yang akurat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Creswell, untuk memperoleh data, penulis dapat mengumpulkan informasi melalui observasi, studi dokumen, wawancara, materi visual, dan menetapkan protokol untuk menerima informasi (Creswell, 2009). Selanjutnya, menurut Bowen, penelitian yang berdasarkan analisis dokumen merupakan prosedur yang sistematis dengan tujuan untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen bukan cetak (elektronik) yang tersedia di internet maupun dokumen cetak (Bowen, 2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari literatur dan dokumen yang sesuai dengan data yang diperlukan dan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif.

3. Hasil dan Diskusi

Berakhirnya *Free Movement of Persons*

Inggris Raya hanya memberikan persyaratan untuk mendaftar di bawah skema pendaftaran pekerja (*Workers Registration Scheme*) selama masa transisi perluasan Uni Eropa. Lebih dari satu juta pekerja-pekerja dari Eropa Tengah dan Eropa Timur tiba di Inggris Raya setelah perluasan Uni Eropa tersebut dengan memanfaatkan pergerakan bebas (*Free Movement of Persons*) Uni Eropa dalam Pasal 45 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa (*Article 45 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)*). Para pekerja migran yang berasal dari Uni Eropa ini mendapatkan hak hukum Uni Eropa atas perlakuan yang sama dalam syarat dan ketentuan kerja serta perlakuan yang sama berdasarkan Pasal 7(2) Peraturan 492/11 (*Article 7(2) of Regulation 492/11*). Di dalamnya, setiap keuntungan sosial dan pajak yang ditawarkan kepada pekerja rumah tangga, termasuk tunjangan dalam pekerjaan seperti Kredit Pajak Anak dan Kredit Pajak Kerja (*Child Tax Credit and Working Tax Credit*). Hak ini juga merupakan pembayaran tunjangan anak (Barnard & Leinarte, 2021).

Jangkauan dari *Free Movement Rights* berupa hak untuk masuk dan tinggal, hak untuk bekerja, hak untuk membawa anggota keluarga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan akses tempat tinggal permanen.

a. Hak untuk masuk dan tinggal

Semua warga negara Uni Eropamemiliki hak untuk bergerak dan tinggal dengan bebas di dalam wilayah negara anggota Uni Eropa tanpa syarat untuk jangka waktu hingga 3 bulan pada pembuatan dokumen perjalanan yang tercatat dalam Pasal 6 (Citizens Directive 2004/58). Terdapat batasan untuk perlakuan yang sama dan tunjangan dalam periode itu, *host country* tidak diwajibkan untuk memberikan bantuan sosial kepada orang atau mahasiswa yang tidak aktif secara ekonomi selama tiga bulan pertama masa tinggal mereka.

b. Hak untuk bekerja

Di bawah ketentuan *Treaty and the Citizen Directive*, warga negara Uni Eropa (dan anggota keluarga mereka) memiliki hak untuk mengakses pekerjaan atas dasar non-diskriminatif sebagai pekerja, wiraswasta atau sebagai penyedia layanan.

c. Hak untuk membawa anggota keluarga

Hak untuk bergerak bebas termasuk hak untuk membawa anggota keluarga. Terlepas dari kewarganegaraan anggota keluarga tersebut atau tingkat pendapatan mereka. Anggota keluarga juga memiliki hak untuk bekerja.

d. Hak untuk mendapatkan perlakuan sama

Hak untuk bergerak bebas baik dalam aturan Traktat maupun undang-undang sekunder memiliki prinsip non-diskriminatif atas dasar kewarganegaraannya. Para migran dan anggota keluarganya harus menikmati perlakuan yang sama seperti warga negara lokal. Hak atas perlakuan yang sama mencakup akses ke pekerjaan, kondisi kerja dan gaji, tunjangan sosial dan pajak, serta akses ke perumahan

e. Hak untuk memperoleh tempat tinggal permanen

Setelah lima tahun tinggal di negara anggota tuan rumah, secara sah warga negara Uni Eropa atau anggota keluarganya dapat menerima hak untuk status tempat tinggal permanen (Woolford & Hunt, 2017).

Free movement of persons merupakan kebijakan yang menjadi dasar mudahnya warga negara anggota Uni Eropa untuk masuk dan keluar dalam lingkup Uni Eropa. Melalui *free movement* juga warga negara anggota Uni Eropa melakukan perpindahan untuk masuk bekerja. Inggris Raya merupakan salah satu *host country* yang menerima banyak warga negara anggota Uni Eropa khususnya Eropa Timur dan Eropa Tengah untuk bekerja di industri agrikultur. Brexit telah menghapus kewarganegaraan Uni Eropa dari warga negara Inggris Raya yang kemudian membatasi secara signifikan hak warga negara Inggris Raya dan warga negara Uni Eropa di Inggris Raya. Terdapat juga peningkatan xenofobia yang ditujukan khusus pada warga negara Uni Eropa. Dinamika lainnya dapat dilihat melalui posisi sosial dari warga negara Uni Eropa yang menyebabkan warga negara Uni Eropa memikirkan untuk tetap bermigrasi di Inggris Raya (Sredanovic, 2021).

Sejak Brexit menutup pintu bagi pekerja melalui berakhirnya *free movement of persons* di Inggris Raya menyebabkan menurunnya jumlah warga Uni Eropa yang bermigrasi ke Inggris Raya (O'Carroll, 2022). Berakhirnya *free movement of persons* dan kejadian Brexit menyebabkan adanya beberapa kategori migran yang termarginalkan. Banyak dari kategori migran yang ingin tetap tinggal tetapi mereka merasa bahwa Brexit pada akhirnya akan memaksa mereka untuk meninggalkan Inggris Raya (Guma & Dafydd Jones, 2019).

Hilangnya *free movement* mengancam sumberdaya para migran dari Uni Eropa, termasuk hak mereka untuk tinggal, menjalankan bisnis, atau mengakses kesejahteraan. Sumberdaya politik dan hukum lintas negara yang mencakup hak kewarganegaraan melalui *free movement* dapat memungkinkan migran mengakses perawatan kesehatan, pensiun, pendidikan, dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Hilangnya *free movement* setelah Brexit menimbulkan hambatan bagi para migran Uni Eropa. Meskipun para migran memiliki banyak tantangan yang sama dan menggunakan sumberdaya yang serupa, terdapat juga beberapa perbedaan di dalamnya. Pensiunan akan kehilangan kewarganegaraan Uni Eropa mereka namun bebas untuk kembali ke Inggris Raya kapan saja, sementara pengusaha dan migran Uni Eropa dapat kehilangan sebagian hak di Inggris Raya sambil tetap mempertahankan kewarganegaraan Uni Eropa dan kebebasan untuk pindah ke negara anggota Uni Eropa lain (Hall dkk., 2022).

Tidak berlakunya *free movement* menyebabkan kekurangan sekitar 330.000 pekerja di Inggris Raya. Sebagian besar berada di sektor ekonomi yang kurang terampil dengan fokus kepada pergerakan bebas dari warga negara Uni Eropa melalui *free movement* yang menjadi pusat kampanye Brexit. Inggris Raya merupakan satu-satunya anggota G7 yang tingkat pekerjaannya menurun. Banyak warga negara asing meninggalkan Inggris Raya, dibandingkan dengan yang datang, yang berarti berakhirnya pergerakan bebas berkontribusi pada kekurangan tenaga kerja dan inflasi (Portes & Springford, 2023).

Berakhirnya *free movement* mengganggu industri agrikultur dalam skema pekerjaannya. The Guardian melaporkan sebanyak 60.000.000 poundsterling makanan telah terbuang sia-sia di agrikultur Inggris Raya karena kekurangan tenaga kerja. Pertanian Inggris Raya berjuang untuk menemukan pekerja yang cukup untuk memetik tanaman di tengah tingkat pekerjaan yang tinggi di Inggris. Brexit telah mengurangi akses ke pekerja sementara yang datang dari Uni Eropa akibat dari tidak berlakunya *free movement*. Negara-negara dari Eropa Timur dan Tengah menyediakan sebagian besar pekerja panen Inggris Raya sebelum Brexit (Butler, 2022).

Tidak Berlakunya CAP (*The Common Agriculture Policy*)

The Common Agriculture Policy (CAP) diluncurkan pada tahun 1962 yang merupakan kerja sama antara agrikultur dan masyarakat, dan antara Uni Eropa dan para pekerja agrikultur. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mendukung pekerja agrikultur, meningkatkan produktivitas pertanian, memastikan pasokan makanan terjangkau dan stabil, melindungi pekerja agrikultur Uni Eropa untuk mencari pendapatan yang layak, membantumengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, memelihara daerah pedesaan dan lanskap di seluruh Uni Eropa, dan menjaga ekonomi pedesaan tetap hidup dengan mempromosikan pekerjaan di bidang agrikultur dan sektor terkait (European Commission, 2023).

CAP dibagi menjadi dua pilar. Pilar pertama dirancang untuk subsidi pendapatan dan intervensi pasar lainnya. Termasuk pembayaran langsung (untuk membantu petani menstabilkan pendapatan pertanian yang berisiko setiap tahun karena harga pasar yang tidak stabil dan kondisi cuaca yang berbeda) dan langkah-langkah pasar (untuk mengatasi eksternalitas pasar tertentu dan untuk mempromosikan perdagangan). Pilar kedua telah dirancang untuk kebijakan pembangunan pedesaan. Ini menyangkut berbagai kegiatan seperti: mendorong

inisiatif pedesaan, mendukung petani muda, membantu petani dengan diversifikasi dan membentuk kelompok produsen, atau sebagai alternatif merestrukturisasi bisnis mereka (European Commission, 2023).

CAP merupakan kebijakan Uni Eropa yang membahas mengenai agrikultur. Di dalamnya juga membahas terkait konteks keadilan pekerja, pertumbuhan dari pedesaan, insentif dan subsidi. Berakhirnya CAP merupakan permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas dari industri agrikultur. Oleh sebab itu, Inggris Raya merumuskan kebijakan agrikultur baru pasca Brexit dalam Kebijakan Agrikultur 2020 sebagai pengganti dari CAP yang diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Inggris Raya yang berkaitan dengan agrikultur.

Signifikansi dan Kontribusi Pekerja Migran Uni Eropa di Industri Agrikultur Inggris Raya

Akhir dari pergerakan bebas dan pengenalan sistem migrasi pasca-Brexit merupakan perubahan struktural besar pada pasar tenaga kerja. Inggris Raya sejak lama bergantung pada pekerja migran dari Uni Eropa untuk industri agrikulturnya. Selama musim puncak, sector agrikultur Inggris Raya akan semakin bergantung pada tenaga kerja temporer yang besar. Diperkirakan sekitar 75.000 orang dibutuhkan dalam memanen tanaman. Diperkirakan 98% dari jumlah ini direkrut dari tempat lain di Uni Eropa (McGuinness & Grimwood, 2017).

Kekurangan pekerja dalam industri agrikultur Inggris Raya terjadi karena Inggris Raya sangat bergantung terhadap pekerja migran dalam memenuhi pasar tenaga kerjanya di industri tersebut. Di Inggris Raya, perekrut pekerja sulit untuk merekrut pekerja lokal dalam sektor-sektor seperti perawatan sosial, perhotelan, agrikultur, pergudangan, dan konstruksi. Rolfe melihat bahwa pekerjaan dalam sektor tersebut dianggap tidak menarik bagi pekerja Inggris Raya, sehingga pekerja pada sektor tersebut terkonsentrasi pada migran Uni Eropa (Rolfe, 2019).

Di dalam migrasi internasional, terdapat elemen selektivitas sebagai pemicu bermigrasi. Elemen selektivitas ini diantaranya adalah biaya potensial, jarak geografis, tenaga kerja dan hak asasi manusia, insiden kejahatan, keamanan pribadi, akses ke perumahan, ketersediaan layanan sosial (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll), tingkat gaji, kemajuan karir, keamanan kerja, kualitas lingkungan, kapasitas dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan budaya asing, perbedaan bahasa, kualitas hubungan sosial dan tempat kerja, toleransi keagamaan, perasaan identitas dan kepemilikan, dan rasa hormat.

Di dalam teori Neoclassical economics: Macro theory dalam migrasi internasional, dijelaskan bahwa perbedaan upah yang dihasilkan menyebabkan pekerja yang berasal dari negara-negara berupah rendah pindah ke negara yang berupah tinggi. Pada industri agrikultur Inggris Raya, pekerja migran dari Uni Eropa melihat biaya potensial dan tingkat gaji yang didapat oleh pekerja migran ini di Inggris Raya. Sebagian besar pekerja pertanian berasal dari negara-negara Uni Eropa dengan struktur upah rendah dan pengangguran tinggi. Tingkat gaji industri agrikultur Inggris lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa dan lebih tinggi daripada di sebagian besar negara Eropa Timur, menjadikan Inggris Raya tujuan yang menarik bagi para pekerja migran (AHDB, 2016).

Selanjutnya, di dalam Neoclassical economics: Micro theory dalam migrasi internasional menjelaskan model dengan focus terhadap pilihan individu. Terdapat limitasi untuk mengetahui alasan pribadi lain yang dilakukan oleh pekerja Uni Eropa yang bermigrasi ke Inggris Raya. Tetapi, jika melihat dari pola migrasi di sektor

agrikultur Inggris Raya dari Uni Eropa, dapat dilihat bahwa migrasi terjadi karena tingkat upah dan akses yang mudah dari *free movement of persons*.

Salah satu masalah di dalam industri agrikultur Inggris Raya adalah kesulitannya dalam menarik pekerja lokal Inggris Raya. Kesulitan-kesulitan ini telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Banyak alasan berbeda dari para warga lokal Inggris Raya termasuk persepsi bahwa pekerjaan di agrikultur melibatkan jam yang tidak ramah, kerja berat dan lokasi di pedesaan, keyakinan bahwa pekerjaan agrikultur dibayar rendah, dan fakta bahwa pekerja agrikultur dan hortikultura dibutuhkan di daerah pedesaan sementara konsentrasi pekerja yang potensial berada di daerah perkotaan. Pada akhirnya, meskipun ada upaya untuk menarik pekerja lokal Inggris Raya ke sektor agrikultur, pemberi kerja berpendapat bahwa pekerja Inggris Raya tidak menginginkan pekerjaan di industri agrikultur (EFRA, 2017).

Pekerja migran dari Uni Eropa berkontribusi mengisi permintaan pekerja dalam masa panen di Inggris Raya. Pekerja migran ini akan datang dan memetik buah dan sayuran yang sudah panen. Setelah Brexit, buah dan sayuran dibiarkan membusuk di Inggris Raya karena Brexit menghalangi para migran mengambil pekerjaan memetik buah dan sayuran (Hanrahan & Harris, 2021). Di dalam pasar tenaga kerja di industri agrikultur Inggris Raya, terdapat lahan panen yang tidak dipetik dikarenakan kurangnya pasokan tenaga kerja untuk memetik yang sebelumnya berasal dari Uni Eropa. Pekerja migran telah menjadi tenaga kerja utama dalam pekerjaan intensif di agrikultur seperti memanen, mengemas, dan mengolah produk hortikultura bernilai tinggi. Kontribusi mereka memungkinkan bisnis hortikultura tetap kompetitif di pasar global dengan menjaga biaya tenaga kerja tetap rendah dan hasil panen yang berkualitas (Rogaly, 2008).

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pekerja migran Uni Eropa meninggalkan Inggris Raya setelah Brexit. Seperti melalui indikator ekonomi. Secara umum, indikator ekonomi memberikan tolak ukur terbaik tentang siapa yang kecewa dengan Brexit. Faktor seperti penghasilan tinggi, situasi kerja yang baik, budaya kerja, dan potensi pengembangan karir dapat menjadi faktor yang mendorong pekerja migran untuk tetap tinggal di Inggris Raya. Hal ini menunjukkan bahwa, sementara Brexit menimbulkan reaksi yang sangat emosional dari para migran, hal tersebut tidak menutupi faktor untuk tetap tinggal yang paling penting bagi mereka, yaitu yang bersifat ekonomi. Oleh karena itu, selama Inggris Raya menawarkan peluang ekonomi yang memuaskan bagi para migran, banyak yang akan memutuskan untuk tetap tinggal. Apabila, Brexit atau faktor lain mempengaruhi ekonomi, jika pendapatan turun, pilihan pekerjaan menjadi terbatas dan potensi pembangunan menurun. Perubahan ini akan menjadi pendorong migran mencari peluang yang lebih baik di tempat lain (Jancewiczk., 2020).

Selanjutnya, alasan para pekerja migran dari Uni Eropa tidak bermigrasi setelah Brexit adalah karena turunnya nilai tukar poundsterling membuat Inggris Raya menjadi pilihan yang kurang menarik sebagai tujuan migrasi. Faktanya, penurunan pertumbuhan tingkat pekerja di Inggris juga dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum dan psikologis terkait ketidakpastian mengenai hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Uni Eropa di masa depan Inggris Raya setelah Brexit. Hal ini mencakup permasalahan politik dan sosial, serta perubahan sentimen yang membuat Inggris Raya tidak lagi menjadi negara yang ramah terhadap migran dari Uni Eropa (Portes, 2022).

Strategi Inggris Raya dalam Industri Agrikultur

a. Menerapkan Visa Pekerja Musiman atau *Seasonal Worker Visa*

Pemerintah Inggris Raya pada 2019 mengadopsi Visa Pekerja Musiman untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang hortikultura. Strategi ini awalnya melibatkan 2.500 pekerja pada 2019 dan ditingkatkan menjadi 30.000 pekerja pada 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 40.000 pekerja, termasuk beberapa dengan visa 8 minggu pada 2022, kemudian kuota akan diturunkan menjadi 30.000 pada 2023 dan 28.000 pada 2024 (UK Parliament, 2022). Pada 2019, fokus utama dari strategi ini difokuskan untuk sektor hortikultura. Kemudian, sektor di mana para pekerja ini akan dipekerjakan diperluas. Visa awalnya akan digunakan untuk perekrutan di bidang hortikultura, tetapi kemudian diumumkan bahwa sektor tersebut akan diperluas untuk mencakup bidang lain, seperti peternakan unggas (Department for Environment & Food & Rural Affairs, 2022).

Program ini adalah visa bersponsor yang dijalankan oleh perantara tertentu yang disetujui, dan bukan oleh pemilik pertanian atau perkebunan secara langsung. Awalnya ada dua perantara yang disetujui, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi empat perantara karena tingginya permintaan untuk visa ini. Perantara ini didukung oleh *Department for Environment, Food and Rural Affairs*, dan dilisensikan oleh *Gangmasters and Labour Abuse Authority* (UK Visas and Immigration, 2023). Perantara dapat mengeluarkan sertifikat sponsor untuk pekerja dan harus memastikan bahwa kondisi kerja sesuai dengan undang-undang tentang upah minimum, kesehatan dan keselamatan, dan hak-hak buruh lainnya. Tugas lebih lanjut dari perantara termasuk tugas pelaporan, jika misalnya seorang pekerja tidak masuk kerja selama sepuluh hari, tugas pencatatan, dan tugas untuk mematuhi undang-undang imigrasi. Visa ini berisi sejumlah persyaratan. Seperti, jangka waktunya hanya sampai enam bulan untuk setiap periode satu tahun, dan para pekerja hanya diizinkan untuk bekerja di sektor yang ditentukan dalam visa mereka. Para pekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan tetap, didampingi oleh anggota keluarga, atau meminta bantuan dana publik yang mencakup serangkaian tunjangan sosial yang tersedia bagi orang-orang berpenghasilan rendah. Terakhir, tidak ada persyaratan bahasa Inggris untuk para pekerja (Mantouvalou, 2022).

Kebijakan imigrasi memiliki maksud untuk membuat sistem yang diberlakukan untuk warga negara asing yang bermigrasi atau tinggal di negara lain dengan menyusun dalam undang-undang, peraturan, keputusan, atau perintah sehubungan dengan seleksi, penerimaan, penyelesaian, dan deportasi. Di dalam kebijakan imigrasi juga menentukan jumlah orang yang dapat memasuki industri negaranya karena alasan ekonomi dan politik. Jika dilihat dalam pendekatan liberalism, kebijakan imigrasi akan melihat pekerja dengan keterampilan rendah (*low-skilled workers*) dan migran gelap sebagai kepentingan dari pengusaha yang dapat meningkatkan kelompok pekerja rentan terhadap eksploitasi. Pemerintah Inggris Raya mengadopsi kebijakan imigrasi dengan meluncurkan Visa Pekerja Musiman untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang agrikultur khususnya dalam program ini di bidang hortikultura. Kebijakan ini melibatkan penggunaan visa bersponsor yang dijalankan oleh perantara tertentu yang disetujui oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor tersebut dan memastikan kondisi kerja sesuai dengan undang-undang.

Melalui program ini, pemerintah Inggris Raya tidak hanya mementingkan terkait pengisian kekosongan pasar lapangan pekerjaan di industri agrikultur, tetapi juga memantau terkait jalannya program ini sehingga para migran dapat

meminimalisir terjadinya eksploitasi pekerja. Seperti yang dikatakan Peters (2015), imigran dengan keterampilan rendah dapat meningkatkan pendapatan negara dan dunia. Dengan industri agrikultur Inggris Raya yang telah lama bergantung kepada pekerja migran, Brexit ini menghilangkan *free movement of persons* dan menyebabkan sentiment negative kepada para migran sehingga migran dari Uni Eropa yang telah berkontribusi di Inggris Raya mulai mencari tempat lain. Hal tersebut seperti yang dikatakan Peters (2015) berpengaruh terhadap pendapatan negara.

Selanjutnya, kategori pekerja hortikultura dalam visa ini merupakan kategori pekerja yang memiliki keterampilan rendah. Di dalam visa ini, pekerja tidak memiliki hak dalam meraih keanggotaan negara Inggris Raya karena sifat dasar dari program ini musiman dan pekerja tidak dapat mendapatkan benefit yang sama seperti pekerja lokal. Hal ini, dijelaskan oleh helbling (2019) terkait perlunya pembeda terkait kebijakan imigrasi, kebijakan integrasi, dan kebijakan kewarganegaraan.

b. Memberlakukan Sistem Imigrasi Berbasis Poin

Setelah Brexit, pergerakan bebas telah berakhir. Pemerintah Inggris Raya memperkenalkan sistem berbasis poin terkait sistem imigrasinya. Hal ini adalah bagian dari program perubahan multi-tahun yang lebih luas, yang dipimpin oleh *Home Office*, untuk mengubah pengoperasian sistem perbatasan dan imigrasi (UK Visas and Immigration, 2020). Di dalam kebijakan imigrasi ini, sistem berbasis poin memungkinkan migran ekonomi memenuhi syarat untuk mendapatkan visa kerja berdasarkan karakteristik dan kualifikasi pribadi mereka. Poin didasarkan pada atribut yang diinginkan, yang mencakup kemampuan Bahasa Inggris, pendidikan tinggi, pengalaman kerja, dan karakteristik umur.

Visa berbasis poin seringkali tidak memerlukan sponsor. Hal ini dapat disesuaikan dengan sistem yang dipimpin pemberi kerja yang membutuhkan pekerja dan pemberi kerja yang mensponsori. Pelamar diberikan poin untuk karakteristik yang berbeda, dan skor mereka pada tes poin digunakan untuk memutuskan apakah mereka dapat bermigrasi (meskipun itu tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan). Ada beberapa fleksibilitas terkait bagaimana pelamar memenuhi kriteria. Sehingga seseorang yang memiliki kualitas yang kurang dari satu yang dicari (misalnya pengalaman kerja yang terampil) dapat bersaing jika mereka memiliki lebih dari yang lain (misalnya kecakapan bahasa). Beberapa orang yang berencana untuk bermigrasi untuk pekerjaan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan visa tanpa harus menunggu tawaran pekerjaan sebelumnya (Sumption, 2019).

Sistem baru ini memberikan kontrol yang ketat terhadap migrasi Uni Eropa dibandingkan dengan pergerakan bebas. Migran yang datang untuk bekerja dengan keterampilan rendah pada prinsipnya tidak akan bisa masuk lagi. Bahkan mereka yang memenuhi syarat akan membutuhkan sponsor untuk melamar atas nama mereka, harus membayar biaya yang signifikan, dan seperti halnya migran di luar Uni Eropa saat ini, memiliki hak yang jauh lebih sedikit, misalnya sehubungan dengan akses ke sistem manfaat (Portes, 2021).

Pemerintah Inggris Raya di sini bertindak mengendalikan imigrasi, seperti yang disebutkan oleh Meyers (2020) Pemerintah Inggris Raya menentukan pola imigrasi dengan alasan ekonomi. Pemerintah Inggris Raya juga mengikuti pola politik klien seperti yang disebutkan oleh Freeman (1995) bahwa biaya imigrasi itu tersebar ke berbagai sisi, tetapi konsentrasi untungnya didapatkan oleh pengusaha.

Pengusaha akan mendapatkan pekerja yang memiliki keterampilan yang sudah diatur oleh Pemerintah Inggris untuk menjalankan usahanya. Sehingga, keuntungan tersebut dapat berupa investasi kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja migran yang bekerja di usahanya.

c. Merumuskan Kebijakan Agrikultur 2020

Keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa juga berarti berakhirnya *Common Agriculture Policy* (CAP) yang dijalankan Uni Eropa. Kebijakan Agrikultur 2020 menyediakan kerangka kerja legislatif untuk skema dukungan pertanian sebagai pengganti dari CAP. Kebijakan ini memberikan menerapkan pendekatan baru untuk pembayaran pertanian dan pengelolaan lahan. Di Inggris, petani akan dibayar untuk menghasilkan *public goods* seperti perbaikan lingkungan atau kesejahteraan pangan. Kebijakan ini juga mencakup langkah-langkah yang lebih luas, termasuk peningkatan keadilan dalam rantai pasokan agrikultur dan pengoperasian pasar agrikultur (Coe dkk., 2020).

Pendekatan "*public funds for public goods*" mendasari Kebijakan Agrikultur 2020. Bentuk subsidi baru ini akan dilihat melalui lensa hak asasi manusia. Pemberian subsidi akan bergantung pada kontribusi untuk tujuan tertentu, seperti perlindungan lingkungan dan produksi pangan berkelanjutan. Kebijakan Agrikultur 2020 menjadi pengganti CAP yang banyak dikritik karena kurangnya kontribusi untuk mencapai pertanian berkelanjutan dan pembayaran besar yang diterima oleh pemilik tanah yang lebih kaya karena kriteria tertentu (Antonopoulos, 2022). Kriteria tersebut tidak tepat sasaran, yang sebagian besar membayar petani untuk jumlah total tanah yang ditanami yang berarti pemilik tanah terbesar mendapatkan subsidi lebih besar, daripada member penghargaan kepada petani untuk keuntungan publik tertentu (Department for Environment & Food & Rural Affairs, 2020).

Migrasi internasional terjadi dengan maksud dan latar belakang tertentu misalnya seperti hak asasi manusia, kebutuhan tenaga kerja, tingkat gaji, dan kualitas lingkungan. Di dalam kebijakan agrikultur yang baru ini, Pemerintah Inggris Raya memberikan subsidi yang lebih adil dan melihat hak asasi manusia dibandingkan sebelumnya di dalam CAP. Subsidi yang diberikan Pemerintah Inggris ke pengusaha lahan dan petani akan mendorong produktivitas lahan sehingga menghasilkan produk yang lebih banyak dan berkualitas. Pemerintah Inggris Raya juga mencoba memberikan perlindungan terhadap lingkungan yang menjadi salah satu factor pekerja migran untuk bermigrasi selain dari faktor tingkat gaji.

Pemerintah Inggris Raya mencoba memberikan benefit dan sistem yang lebih baik melalui kebijakan baru ini. Seperti yang dijelaskan oleh George Eustice, *Environment Secretary* dalam (Department for Environment & Food & Rural Affairs, 2020). Pemerintah Inggris Raya akan mendukung petani dalam mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan mereka, untuk membantu mereka yang ingin pensiun atau meninggalkan industri, dan untuk menciptakan peluang dan dukungan baru bagi pendatang baru yang masuk ke industri agrikultur.

d. Mendorong Pekerja Lokal dan Otomatisasi

Di dalam strategi jangka panjangnya, Inggris Raya mencoba mendorong pekerja lokal untuk bekerja di industri agrikultur dan menginvestasikan ke dalam otomatisasi. Pemerintah harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar sektor agrikultur menjadi lebih tidak bergantung pada tenaga kerja migran dan menggunakan lebih banyak pekerja Inggris Raya (EFRA, 2017). Pasar tenaga kerja

yang ketat dapat memacu kenaikan upah dan membuat sektor pertanian lebih menarik bagi tenaga kerja domestik. Terdapat juga ruang untuk peningkatan mesin dan otomatisasi (Marshall dkk., 2022).

Robert Goodwill, *Minister of State, Home Office* dan George Eustice *Minister of State, DEFRA* dalam (EFRA, 2017) menyoroti berbagai rangkaian aktivitas Pemerintah Inggris Raya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Pertama, reformasi sistem tunjangan yang bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang kembali ke dunia kerja. Kedua, mendorong otomatisasi dan mekanisasi sektor agrikultur yang lebih besar, memungkinkan pola pertumbuhan yang lebih teratur dan lebih sedikit kebutuhan akan tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi pekerja di sektor agrikultur. Keempat, melipatgandakan jumlah pekerja magang yang bekerja di bidang agrikultur. Kelima, mencoba merubah persepsi tentang pekerjaan di bidang agrikultur dan mendorong keyakinan bahwa itu adalah karir yang berharga. Terakhir, meningkatkan pemahaman tentang makanan dan agrikultur sejak usia muda sehingga meningkatkan kesadaran akan kemungkinan karir di sektor ini.

Pengaruh Strategi Inggris Raya terhadap Industri Agrikultur

Strategi pemerintah Inggris Raya memberikan dorongan bagi industri setelah bertahun-tahun kebijakan yang tidak efisien dan terlalu birokratis didikte oleh Uni Eropa kepada petani. Strategi ini memberdayakan petani dan pengelola lahan, serta memastikan bahwa pemerintah dapat memberi mereka penghargaan yang pantas atas kerja baik yang mereka lakukan. Strategi ini akan membantu petani tetap kompetitif, meningkatkan produktivitas, berinvestasi dalam teknologi baru, dan mencari pengembalian yang lebih adil dari pasar. Berdasarkan data pada bab iv terkait dinamika industri agrikultur pasca brexit di inggris raya, dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel.1 Data Terkait Kinerja Agrikultur Inggris Raya

Subjek	2020	2021	% Kenaikan/ penurunan
Total Area Agrikultur (dalam hektar)	18.627.717	18.630.683	0,02
Area Lahan Agrikultur yang dimanfaatkan (dalam hektar)	17.269.065	17.226.645	-0,25
Total Luas Lahan Subur (dalam hektar)	4.314.456	4.412.986	2,28
Pendapatan Rata-Rata Bisnis Agrikultur (FBI) (dalam poundsterling)	180.000	184.000	2,22
Total pendapatan dari Agrikultur (TIFF) (dalam poundsterling)	5.257.000.000	5.998.000.000	14,09
Nilai Tambah Bruto (GVA) dengan Harga Dasar (dalam poundsterling)	10.308.000.000	11.222.000.000	8,87
Ekspor ke Negara-Negara Uni Eropa (dalam poundsterling)	9.099.000.000	7.790.000.000	-14,39
Impor dari Negara-Negara Uni Eropa (dalam poundsterling)	24.422.000.000	22.064.000.000	-9,65
Ekspor ke Negara-Negara di luar Uni Eropa (dalam poundsterling)	6.821.000.000	7.467.000.000	9,47
Impor dari Negara-Negara di luar Uni Eropa (dalam poundsterling)	11.244.000.000	11.946.000.000	6,24
Total Faktor Produktivitas (FTP) (dibandingkan dari 1973 = 100)	153,8	158,4	2,99
Total Pekerja dari Uni Eropa di Industri Agrikultur (per Juni)	41.500	34.500	-16,87
Total Pekerja di Industri Agrikultur (per Juni)	203.900	204.900	0,49

Sumber: Diolah oleh Penulis dari DEFRA dan HMRC, 2022

Berdasarkan tabel.1 dapat dilihat terdapat kenaikan dan penurunan dalam persentase antara tahun 2020 dan 2021. Pada total area agrikultur, terdapat kenaikan sebesar 0,02% pada 2021. Kenaikan tersebut berarti menandakan total area agrikultur yang bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada total area lahan agrikultur yang dimanfaatkan. Inggris Raya membenahi permasalahan kekurangan pekerja dengan memaksimalkan area lahan sesuai dengan kapasitas pekerjanya. Lebih lanjut, total area lahan agrikultur yang dimanfaatkan ini terdiri dari tanaman subur dan hortikultura, tanah subur yang tidak ditanami, tanah penggembalaan, padang rumput sementara dan permanen dan tanah yang digunakan untuk babi luar ruangan. Sehingga, terdapat penurunan total area lahan agrikultur yang dimanfaatkan sebesar -0,25% pada 2021. Selanjutnya, total luas lahan subur merupakan lahan yang digunakan secara spesifik untuk penanaman tanaman yang biasanya ditanam secara bergilir dan memerlukan penanaman kembali. Total luas lahan subur pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,28% yang berarti bahwa lahan yang digunakan untuk tanaman subur yang dihasilkan oleh pekerja agrikultur meningkat. Hal tersebut merupakan langkah positif yang dapat dilihat dari strategi Inggris Raya dalam menanggulangi permasalahan agrikultur.

Selanjutnya dilihat dari pendapatan rata-rata bisnis agrikultur (FBI). Pendapatan rata-rata bisnis agrikultur meningkat sebesar 2,22% pada 2021. Hal tersebut berarti terdapat kenaikan pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh semua tenaga kerja yang tidak dibayar. Selanjutnya, dilihat dari total pendapatan dari agrikultur (TIFF). Total pendapatan dari agrikultur meningkat sebesar 14,09% pada 2021. Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan yang diterima dari seluruh pertanian di Inggris Raya dan orang-orang yang terlibat meningkat dari segi pendapatannya. Selanjutnya dilihat dari nilai tambah bruto (GVA). Terdapat kenaikan pada nilai tambah bruto dengan harga pasar sebesar 8,87% pada 2021. Hal tersebut menandakan adanya kenaikan dari ukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu area industri agrikultur ke sektor ekonomi.

Selanjutnya, dalam segi ekspor dan impor negara-negara Uni Eropa menurun pada 2021. Hal tersebut berarti Inggris Raya mulai berdikari dan terlepas dari Uni Eropa sesuai dengan maksud dari Brexit itu sendiri. Kebalikan dengan ekspor dan impor negara-negara di luar Uni Eropa yang meningkat pada 2021. Inggris Raya di sinimulai meningkatkan pengaruhnya dalam kerja sama ekspor dan impor produk agrikultur di dunia internasional. Dari segi ekonomi sendiri, pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis melalui fenomena ini. Ekspor dan impor dapat dijadikan acuan terhadap pertumbuhan ekonomi dari Inggris Raya. Jika dilihat dari fenomena di atas, Inggris Raya mulai mencoba melebarkan pengaruhnya di luar Uni Eropa. Meskipun terjadi penurunan terhadap ekspor dan impor di Uni Eropa, Inggris Raya mengalami kenaikan pada ekspor dan impor di luar Uni Eropa. Selanjutnya adalah total faktor produktivitas (FTP). Terdapat kenaikan sebesar 2,99% pada 2021.

Di dalam segi produktivitas industri agrikultur Inggris Raya, dapat dilihat bahwa kenaikan ini merupakan indikator yang meningkatkan total pendapatan pada industri agrikultur. Meningkatnya produktivitas sendiri menandakan peningkatan kinerja dari industri agrikultur. Selanjutnya, terkait total pekerja di industri agrikultur. Terdapat penurunan pekerja migran dari Uni Eropa sebesar -16,87% pada 2021. Tetapi, kebalikannya terkait total jumlah pekerja di industri agrikultur yang meningkat sebesar 0,49% pada 2021. Hal ini menandakan berkurangnya ketergantungan Inggris Raya pada pekerja migran dari Uni Eropa dan mulai mencoba

berdikari dengan mengundang pekerja lokal dan pekerja di luar Uni Eropa sesuai dengan strategi yang dilakukan Inggris Raya. Semakin banyak pekerja di industri agrikultur semakin besar juga tingkat produktivitas yang dijalankan dalam industri ini.

Kurangnya pekerja di industri agrikultur berhasil diminimalisir oleh Inggris Raya yang dulunya bergantung terhadap pekerja migran dari Uni Eropa. Hal tersebut juga dapat menjadi solusi untuk meminimalisir tanaman yang tidak dapat dipetik dikarenakan kurangnya pekerja yang memetik hasil panen. Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa Inggris Raya berhasil dalam meminimalisir permasalahan di industri agrikulturnya. Meskipun, terdapat beberapa yang secara performa tidak lebih baik seperti dalam ekspor dan impor Uni Eropa, tetapi di sini Inggris Raya dapat meminimalisir dari apa yang seharusnya terjadi terkait ketergantungannya terhadap pekerja dari Uni Eropa.

Kesimpulan

Migrasi internasional menjadi isu yang sangat dipolitisasi di Inggris Raya, khususnya terkait peran pekerja migran dari Uni Eropa. Salah satu hal yang membedakan Inggris Raya darisebagian besar negara anggota Uni Eropa adalah bahwa negara ini tidak memberlakukan pembatasan penerimaan pekerja dari negara-negara Uni Eropa. Namun, setelah Brexit, Inggris Raya mengganti sistem imigrasi baik dari Uni Eropa maupun di luar Eropa. Tujuannya adalah menciptakan aturan dan prosedur yang seragam bagi warga negara Uni Eropa dan di luar Uni Eropa. Brexit mengakhiri *free movement of persons*, yang dapat berdampak pada sector agrikultur Inggris Raya yang sangat mengandalkan pekerja migran dari Uni Eropa, terutama dari Eropa Timur dan Tengah. Setelah Brexit, *Common Agriculture Policy* juga diganti menjadi Kebijakan Agrikultur 2020.

Inggris Raya sangat bergantung kepada pekerja dari Uni Eropa sehingga ketika Brexit terjadi kekurangan pekerja khususnya di industri agrikultur. Di dalam keputusan untuk melakukan migrasi, terdapat elemen selektivitas di dalamnya. Selain itu, terdapat juga alasan yang menjadi landasan migran bermigrasi yaitu berdasarkan tingkat upah serta akses yang mudah melalui *free movement of persons* dan lingkungan yang bersahabat bagi para migran di Inggris Raya. Brexit telah menurunkan alasan selektivitas bagi para pekerja migran Uni Eropa yang sebelumnya didapatkan ketika bergabung di Uni Eropa. Sehingga, tingkat pekerja migran dari Uni Eropa ke Inggris Raya menurun.

Melalui permasalahan tersebut, Inggris Raya membuat strategi dalam meminimalisir dampaknya ke negaranya. Melalui strateginya, Inggris Raya memberlakukan menerapkan visa pekerja musiman, memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin, merumuskan kebijakan agrikultur 2020, serta mendorong pekerja lokal dan otomatisasi. Melalui strategi-strategi tersebut, dapat dilihat pengaruhnya pada industri agrikultur Inggris Raya. Pengaruh tersebut dilihat dari total area agrikultur, total luas lahan subur, pendapatan rata-rata bisnis agrikultur (FBI), total pendapatan dari agrikultur (TIFF), nilai tambah bruto (BVA) dengan harga dasar, ekspor dan impor, total factor produktivitas (FTP), total pekerja dari Uni Eropa di industry agrikultur, dan total pekerja di industri agrikultur. Inggris Raya berhasil mengurangi ketergantungannya pada pekerja migran dari Uni Eropa dalam industri agrikultur. Dengan total pekerja Uni Eropa di industri agrikultur yang menurun sebesar 16,87% per Juni 2021, dengan tingkat kenaikan dari total pekerja industri agrikultur Inggris

Raya sebesar 0,49% per Juni 2021. Inggris Raya mulai mengundang pekerja lokal dan pekerja dari luar Uni Eropa, yang membantu meningkatkan tingkat produktivitas dalam industri tersebut. Masalah kurangnya pekerja di sektor agrikultur berhasil diminimalisir dan hal ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah pekerjaan memetik tanaman yang sebelumnya terabaikan. Secara keseluruhan, strategi-strategi tersebut telah membantu Inggris Raya dalam meminimalisir permasalahan agrikultur.

Daftar Pustaka

- AHDB. (2016). *The impact of Brexit on the UK agricultural workforce*. https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/Imported%20Publications%20Docs/Horizon_Brexit_Analysis_20September2016.pdf
- Antonopoulos, I. (2022). "Public money for public goods" and property rights. Dalam *The Governance of Agriculture in Post-Brexit UK* (1st Edition). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003010852-4/public-money-public-goods-property-rights-irene-antonopoulos>
- Barnard, C., & Leinarte, E. (2021). Brexit & free movement of workers. *Lavoro e Diritto*. <https://doi.org/10.1441/98122>
- Bjerre, L., Helbling, M., Römer, F., & Zobel, M. (2015). Conceptualizing and Measuring Immigration Policies: A Comparative Perspective. *International Migration Review*, 49(3), 555–600. <https://doi.org/10.1111/imre.12100>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bryman, A. (2008). *Social research methods* (3rd Edition). Oxford University Press.
- Butler, S. (2022). Up to £60m in UK crops left to rot owing to lack of workers, says NFU. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/15/pounds-60m-in-uk-crops-left-to-rot-lack-of-workers-nfu-farming>
- Coe, S., Finlay, J., Ward, M., & Audickas, L. (2020). *The Agriculture Act 2020*. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8702/>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). SAGE Publications.
- Department for Environment, & Food & Rural Affairs. (2020). Landmark Agriculture Bill becomes law. *GOV.UK*.
- Department for Environment, & Food & Rural Affairs. (2022). *Government food strategy*. <https://www.gov.uk/government/publications/government-food-strategy>
- EFRA. (2017). *Feeding the nation: labour constraints*. <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmenvfru/1009/1009.pdf>
- European Commission. (2023). *The common agricultural policy at a glance*. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap-glance_en
- Francisca, Y., Trihastuti, N., & Roisah, K. (2017). Implikasi Referendum Brexit terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom. *Diponegoro Law Journal*, 6(2).

- Guma, T., & Dafydd Jones, R. (2019). “Where are we going to go now?” European Union migrants’ experiences of hostility, anxiety, and (non-)belonging during Brexit. *Population, Space and Place*, 25(1), e2198. <https://doi.org/10.1002/psp.2198>
- Hall, K., Phillimore, J., Grzymala-Kazłowska, A., Vershinina, N., Ögtem-Young, Ö., & Harris, C. (2022). Migration uncertainty in the context of Brexit: resource conservation tactics. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(1), 173–191. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1839398>
- Hanrahan, L., & Harris, C. (2021). “Devastating”: Crops left to rot in England as Brexit begins to bite. *Euronews*. <https://www.euronews.com/2021/07/14/devastating-crops-left-to-rot-in-england-as-brex-it-begins-to-bite>
- Jancewicz, B., Kloc-Nowak, W., & Pszczółkowska, D. (2020). Push, Pull and Brexit: Polish Migrants’ Perceptions of Factors Discouraging them from Staying in the UK. *Central and Eastern European Migration Review*, 9(1), 101–123.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Lutz, P. (2021). Loved and feared: citizens’ ambivalence towards free movement in the European Union. *Journal of European Public Policy*, 28(2), 268–288. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1720782>
- Mantouvalou, V. (2022). The UK Seasonal Worker Visa. *European Law Open*, 1(3), 711–719. <https://doi.org/10.1017/elo.2022.39>
- Marshall, J., Rutter, J., Kane, J., & Goss, D. (2022). *Agriculture after Brexit: Replacing the CAP*. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/agriculture-after-brex-it.pdf>
- McGuinness, T., & Grimwood, G. G. (2017). *Migrant workers in agriculture*. <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7987/CBP-7987.pdf>
- Meyers, E. (2000). Theories of International Immigration Policy-A Comparative Analysis. *International Migration Review*, 34(4), 1245. <https://doi.org/10.2307/2675981>
- Milbourne, P., & Coulson, H. (2021a). Migrant labour in the UK’s post-Brexit agri-food system: Ambiguities, contradictions and precarities. *Journal of Rural Studies*, 86, 430–439. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.009>
- Milbourne, P., & Coulson, H. (2021b). Migrant labour in the UK’s post-Brexit agri-food system: Ambiguities, contradictions and precarities. *Journal of Rural Studies*, 86, 430–439. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.009>
- Natter, K. (2018). Rethinking immigration policy theory beyond ‘Western liberal democracies.’ *Comparative Migration Studies*, 6(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s40878-018-0071-9>
- Natter, K., Czaika, M., & de Haas, H. (2020). Political party ideology and immigration policy reform: an empirical enquiry. *Political Research Exchange*, 2(1), 1735255. <https://doi.org/10.1080/2474736X.2020.1735255>
- O’Carroll, L. (2022). Number of EU citizens moving to UK plunges post-Brexit – report. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/politics/2022/aug/15/number-eu-citizens-moving-to-uk-plunged-post-brex-it-report>

- Pammasena, E. A. (2017). Kepentingan Inggris Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa. *JOM FISIP UNRI*, 4(2), 1–16.
- Portes, J. (2021). Between the Lines: Immigration to the UK between the Referendum and Brexit. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3759590>
- Portes, J. (2022). Immigration and the UK economy after Brexit. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(1), 82–96. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab045>
- Portes, J., & Springford, J. (2023). *Early impacts of the post-Brexit immigration system on the UK labour market*. https://policycommons.net/artifacts/3371536/insight_js_jp_17123/4170340/
- Rogaly, B. (2008). Intensification of workplace regimes in British horticulture: the role of migrant workers. *Population, Space and Place*, 14(6), 497–510. <https://doi.org/10.1002/psp.502>
- Rolfe, H. (2019). Challenges for Immigration Policy in Post-Brexit Britain: Introduction. *National Institute Economic Review*, 248, R1–R4. <https://doi.org/10.1177/002795011924800108>
- Sredanovic, D. (2021). Brexit as a Trigger and an Obstacle to Onwards and Return Migration. *International Migration*, 59 (6), 93–108. <https://doi.org/10.1111/imig.12712>
- Sumption, M. (2019). *The Australian points-based system: what is it and what would its impact be in the UK?* <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/the-australian-points-based-system-what-is-it-and-what-would-its-impact-be-in-the-uk/>
- Sumption, M. (2022). Shortages, high-demand occupations, and the post-Brexit UK immigration system. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(1), 97–111. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab046>
- Sumption, M., & Reino, M. F. (2018). *Exploiting the Opportunity? Migrants in Low-skilled Work after Brexit*.
- UK Parliament. (2022). *Agriculture: Seasonal Workers: Question for Home Office*. UK Parliament. <https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2022-06-09/15228#>
- UK Visas and Immigration. (2020). *The UK's points-based immigration system: policy statement*. <https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement>
- UK Visas and Immigration. (2023). *Workers and Temporary Workers: guidance for sponsors: sponsor a seasonal worker (accessible version)*. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/workers-and-temporary-workers-guidance-for-sponsors-sponsor-a-seasonal-worker/workers-and-temporary-workers-guidance-for-sponsors-sponsor-a-seasonal-worker-accessible-version>
- White, C. C. (2011). *The Relationship Between International Migration and Regional Integration* [Dissertation, Old Dominion University]. DOI: 10.25777/1mg9-bm71
- Woolford, J., & Hunt, J. (2017). *The UK in a Changing Europe: Wales and The EU Free Movement of Persons*. https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1288925/FREE-MOVEMENT-OF-PEOPLE-final-jb.pdf